

RENCANA

KERJA

(RENJA)TAHUN

2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BALANGAN



RENCANA KERJA

(RENJA)TAHUN 2023

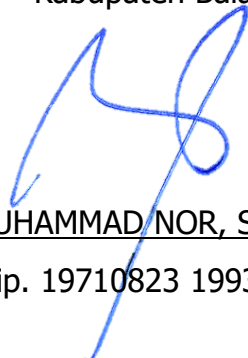
KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2022. Renja ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap SKPD sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari tahapan upaya pencapaian rencana kerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan tahun 2022. Dengan tersusunnya Renja ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dan memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan..

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Balangan



MUHAMMAD NOR, S.Sos., MM
Nip. 19710823 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2020	5
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISKOMINFOSAN TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2020.	5
2.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	23
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	30
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	30
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	47
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN SINERGITAS KEBIJAKAN DAERAH.....	47
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD	52
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	71
BAB V PENUTUP	80
DFTAR TABEL	
TABEL 2.1	6
TABEL 2.9	10
TABEL 3.0	28
TABEL TC 3.1	32
TABEL 2.5	45
TABEL 3.1	50
TABEL 3.2	57
TABEL 4.1	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Renja SKPD. Renja SKPD merupakan pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Balangan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dan Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang menginstruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016. Hal ini berdampak pada perencanaan SKPD dimana SKPD diharapkan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 didasarkan kepada Renstra DISKOMINFOSAN Tahun 2021- 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2023.

Tahun Anggaran 2023 adalah tahun Ketiga pelaksanaan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan

Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam RENJA Tahun 2023 yang memuat rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana dan pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Sattistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran untuk :

- a.** Merumuskan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023;
- b.** Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2023;
- c.** Menciptakan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan;
- d.** Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai arah dan acuan ;

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review atas rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN 2021

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2021 dan Capaian Renstra Tahun 2021.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 ada penambahan jumlah program yang dilaksanakan oleh Diskominfo, sehingga jika semula ada 13 program pada 2020, berkurang menjadi 5 program di tahun 2021. Sedangkan untuk jumlah kegiatan tidak mengalami penambahan, pada tahun 2020 ada 48 kegiatan, sedangkan di tahun 2021 berkurang menjadi 12 kegiatan, dan 28 Sub Kegiatan.

Jumlah program/kegiatan berdasarkan PK Diskominfo Tahun 2021 berjumlah 12 kegiatan.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 cukup baik, yaitu sebesar Rp. **8.985.790.878,-** atau 84,43% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. **10.642.306.890,-**.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Realisasi Keuangan Program Kegiatan Diskominfosan Kabupaten Balangan Berdasarkan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.114.794.316	1.342.417.020	43,09	100
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.060.000	19.760.000	85,69	100
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.060.000	19.760.000	85,69	100
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.264.516.427	830.689.971	65,69	100
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.264.516.427	830.689.971	65,69	100
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	173.100.000	130.200.000	75,22	100
3.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.100.000,	39.200.000	95,38	100
4.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	132.000.000	91.000.000	68,94	100
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.001.138.962	672.022.129	67,12	100
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.170.950	6.971.600	68,54	100
6.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	409.516.033	138.669.000	33,86	100
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.522.400	18.546.400	69,85	100
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000	6.360.000	75,71	100
9.	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	546.529.579	501.475.129	91,76	
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.851.000	181.971.000	98,44	100
10.	Pengadaan Kendaraan Dinas	120.900.000	118.020.000,	97,62	100

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik
	Operasional/Lapangan				
11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.951.000	63.951.000	100,00	100
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.624.227	109.226.877	68,86	100
12.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.003.000	12.926.700,	51,70	
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.857.227	25.151.177	53,68	
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.764.000	71.149.000	71,50	
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	309.503.700	229.237.014	74,06	
15.	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional	120.183.700	85.937.014	71,50	100
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/bangunan lainnya	189.320.000	143.300.000	75,69	100
B	Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	3.229.510.536	3.067.184.000	94,97	100
VII I	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.229.510.536	3.067.184.000	94,97	100
17.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	36.220.000	32.391.000	89,43	100
18.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	90.450.000	56.300.000	62,24	100
19.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	27.500.000	21.000.000	76,36	100
20.	Layanan Hubungan Media	3.051.475.536	2.939.614.000	96,33	
21.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	23.865.000	17.879.000	74,92	100
C	Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	3.980.564.038			
IX	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	302.754.038	207.468.224	68,53	100
22.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	302.754.038	207.468.224	68,53	100

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik
X	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.677.810.000	3.405.257.453	92,59	100
23.	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	87.060.000,	65.614.000	75,37	100
24.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	3.500.800.000	3.249.918.453	92,83	100
25.	Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	89.950.000	89.725.000	99,75	100
D	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	290.480.000	169.790.000	58,45	100
XI	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	290.480.000	169.790.000	58,45	100
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	290.480.000	169.790.000	58,45	100
E	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	38.958.000	21.360.000	54,83	100
XII	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.958.000	21.360.000	54,83	100
27	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik	38.958.000	21.360.000	54,83	100
	TOTAL	10.654.306.890	9.044.166.668	84,89	100

Berdasarkan perbandingan anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah mencapai 88,13% : 11,87% atau hampir mencapai 9:1. Dengan proporsi perbandingan anggaran tersebut, Diskominfo menggunakan anggaran yang disediakan dalam APBD sebagian besar digunakan untuk program kegiatan Diskominfo.

Untuk lebih jelas dalam evaluasi pelaksanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel 2.9 di bawah ini;

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangk at Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2021	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)		
	Usuran											
	Bidang Usuran Sekretariat											
2	10	1	0	1	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

2	10	1	2	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3	3	3	3	1	3	9	3
2	10	1	2	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban tugas	27	24	24	24	1	27	75	2,78
2	10	1	2	05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan Jumlah Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu yang diadakan Jumlah Pakaian Lapangan yang diadakan	100	70	70	70	1	100	240	2,4
2	10	1	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	39	24	24	24	1	63	111	2,8

2	10	1	0	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	12	12	12	1	12	36	3
2	10	1	0	6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	61	143	143	143	1	0	286	4,68
2	10	1	0	6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	12	12	12	1	12	36	3
2	10	1	0	6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	12	12	12	1	12	36	3

2	10	1	0	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	12	12	12	1	12	36	3
2	10	1	0	7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0	3	3	3	1	0	6	0
2	10	1	0	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	0	6	6	6	1	0	12	0

2	10	1	0	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadakan	12	12	12	12	1	12	36	3
2	10	1	0	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	12	12	12	12	1	12	36	3
2	10	1	0	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	12	1	36	12	3
2	10	1	0	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12	12	12	12	1	12	36	3

2	10	1	0	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan Gedung kantor yang disediakan	12	12	12	12	1	36	12	3
2	10	1	1	15		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	85	80	80	80	1	80	240	2,8
2	10	1	1	15	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase aduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	1	100	300	3
2	10	1	1	15	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten berita yang siap tayang	48	48	48	48	1	48	144	3
2	10	1	1	15	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah artikel info publik	600	600	600	600	1	600	1800	3
2	10	1	1	15	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah media publikasi informasi daerah dimedia massa cetak dan online	40	23	23	23	1	40	103	2,57

2	10	1	1	15	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang diberdayakan dikabupaten Balangan	8	5	5	5	1	8	33	2,62
2	10	1	1	16		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	40	10	10	10	1	20	70	1.75
							Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18	18	18	18	1	18	54	3
2	10	1	1	16	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	1	100	300	3

2	10	1	1	17	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase SKPD yang dibentuk dan menjalankan PPID Pembantu	100	100	100	100	1	100	300	3
2	10	1	1	17	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas antar SKPD	68	22	22	22	1	45	135	1,98
							Persentase pembangunan dan pengembangan jaringan koneksi internet di Desa Blank Spot	96	84	84	84	1	92	272	2,8
							Persentase layanan internet yang disediakan Dinas Kominfo	1	1	1	1	1	1	3	3

2	10	1	1	17	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Pembangunan Jaringan LAN, WAN, Satelit Pembangunan Ruang Server dan Comand Center Control	0	1	1	1	1	0	1	0,3
														0	
2	10	1	1	16		Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi.	Terjaminnya Keamanan Informasi pemerintah daerah	100	100	100	100	1	100	300	0,00
2	10	1	1	16	1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Software di perangkat Pemerintah Daerah	100	100	100	100	1	100	300	3
2	10	1	1	15	01	Sosialisasi Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sosialisasi Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1	0	0	0	0	1	1	1
2	14	1	1	15		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam	65	25	25	25	1	45	135	2,07

2.2 Analisa Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4(Empat) sasaran dan 5 (Lima) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "Sangat Tinggi" yaitu capaiannya rata – rata \geq .100% dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS *MENINGKATNYA KUALITAS INFORMASI PUBLIK TERKAIT KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH YANG BAIK, CEPAT, TEPAT DAN OBYEKTIF*

No.	Indikator	2020	2021			Capaian 2021 thdp 2020
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS KONTEN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH	75	78	78	100%	133%
Rata-rata Capaian					100%	

❖ **Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi instansi penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Mengacu pada peraturan tersebut, Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021, dikategorikan Baik, dan SKM pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, unsur-unsur Survei Kepuasan Masyarakat meliputi :

1. Persyaratan. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur. Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif.

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
 Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana.
 Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku pelaksana.

Sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Sarana dan prasarana.
 Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer dan mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan.
 Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Berdasarkan data yang dihimpun dari kuisisioner, maka didapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan seperti pada Tabel 7.

Tabel 7. Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan

Kode Unsur	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Persyaratan pelayanan	0,37
U2	Sistem, mekanisme, prosedur	0,39

U3	Waktu penyelesaian pelayanan **)	0,36
U4	Biaya/ Tarif *)	0,41
U5	Produk/ hasil layanan	0,38
U6	Kompetensi pelaksana	0,38
U7	Perilaku pelaksana	0,39
U8	Sarana dan Prasarana	0,35
U9	Penanganan Pengaduan	0,38

Dari Tabel 7 terlihat bahwa nilai rendah ada pada U2, U3 dan U8 atau Unsur Prosedur, Unsur Waktu Pelayanan, dan Unsur Sarana Prasarana. Hal ini memperlihatkan bahwa pelayanan yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dipersepsikan responden menjadi kelemahan atau kekurangan pada pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah U4 atau Biaya/Tarif dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan. Biaya/tarif ini memang seharusnya yang tertinggi karena semua layanan tidak dipungut biaya atau gratis. Untuk unsur yang masuk dalam kategori kualitas pelayanan yang baik perlu selalu dipertahankan dan ditingkatkan. Berikut secara lengkap nilai tiap-tiap unsur pelayanan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data dari survei yang telah dilaksanakan yang dituangkan dalam table.

Nilai

Terendah

Dari Tabel 7 terlihat bahwa nilai rendah ada pada U2, U3 dan U8 atau Unsur Prosedur, Unsur Waktu Pelayanan, dan Unsur Sarana Prasarana. Hal ini memperlihatkan bahwa pelayanan yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dipersepsikan responden menjadi kelemahan atau kekurangan pada pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah U4 atau Biaya/Tarif dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan. Biaya/tarif ini memang seharusnya yang tertinggi karena semua layanan tidak dipungut biaya

atau gratis. Untuk unsur yang masuk dalam kategori kualitas pelayanan yang baik perlu selalu dipertahankan dan ditingkatkan. Berikut secara lengkap nilai tiap-tiap unsur pelayanan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data dari survei yang telah dilaksanakan yang dituangkan dalam tabel.

SASARAN STRATEGIS *MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR*
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No.	Indikator	2020	2021			Capaian 2021 thdp 2020
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi	100 %	20 %	20 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian						100%

❖ **Meningkatnya Infrastruktur TIK**

Capaiannya 100%, yakni sebesar 20% dari target yang ingin di capai di tahun 2020, 5 desa dari 25 desa blank spot yg terlayani TIK.

Sehingga realisasi yang didapat sebesar 20% berdasarkan target kinerja tahun 2020 sebesar 20% didapat persentase capaian kinerja sebesar 100 %.

Pencapaian Kinerja desa yang terlayani TIK dari tahun 2019 s/d Th 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019-2021	Realisasi 2019-2021	% Capaian
Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi internet	% Cakupan Desa Terpencil yang terlayani Infrastruktur Telekomunikasi	21 desa blank spot yang terlayani TIK	21 desa blank spot yang terlayani TIK	100 %

SASARAN STRATEGIS *TERMANFAATKAN DATA DAN INFORMASI*

STATISTIK SEKTORAL

No.	Indikator	2020	2021			Capaian 2020 thdp 2021
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100%	100 %	100%	100%

❖ **Termanfaatkan data dan Informasi Statistik Sektoral**

Capaian realisasi yang didapat sebesar 100% berdasarkan target kinerja tahun 2020 sebesar 100 % didapat persentase capaian kinerja sebesar 100%

Pencapaian Kinerja Termanfaatkan Data dan Informasi Statistik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Termanfaatkannya Data dan informasi Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%

Faktor keberhasilan kinerja ini didapat karena :

❖ **Presentase peningkatan data statistik.**

- Peningkatan persentase data yang dikumpulkan, realisasi sebesar 100% dari target 100%
- Peningkatan persentase data yang diolah, realisasi sebesar 100% dari target 100%

- Peningkatan perentase Data yang dianalisis, realisasi sebesar 100% dari target 100%.
- Peningkatan jumlah buku statistic yang dicetak, realisasi sebesar 3 Buku dari target 3 Buku.

SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA APLIKASI YANG AMAN

No.	Indikator	2020	2021			Capaian 2020 thdp 2021
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Pengelolaan Keamanan Informasi Perangkat Daerah	100 %	100%	100 %	100%	100%

❖ **Terwujudnya Aplikasi yang Aman**

Capaian realisasi yang didapat sebesar 100% berdasarkan target kinerja tahun 2020 sebesar 100 % didapat persentase capaian kinerja sebesar 100%

Pencapaian Kinerja Terwujudnya Aplikasi yang aman

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Aplikasi yang Aman	Persentase Pengelolaan Keamanan Informasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Disamping sebagai dinas teknis yang merumuskan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berupa retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan sewa tanah dan bangunan ATM Bank Kalsel. Pada tahun 2021 target PAD yang dibebankan pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah senilai Rp.12.000.000,- dan realisasinya yaitu sebesar 486,46% atau sebesar Rp.

58.375.790,-.Sedangkan pada tahun 2022 target yang dibebankan sebesar Rp.49.500.000,-dan realisasi sampai dengan Bulan September yaitu sesesar 100%

Tabel 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi/Kabupaten/Kota Kabupaten Balangan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap akses dan Kualitas Konten Informasi public Pemerintah			75	80	80	85	78	80	80	85	
2	Persentase Ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi			18	18	18	18	11	11	18	18	
3	Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pengelolaan Keamanan Informasi Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor : 14 Tahun 2016 tentang "Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan". Sebagai Lembaga Teknis daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian. Dan Sesuai Perbup Kabupaten Balangan Nomor : 38 Tahun 2016 tentang "Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Maka disusunlah Uraian Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika .

Uraian Tugas Pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan sebagai pendorong pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pengadaan infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi memerlukan

biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, sehingga pembangunan infrastruktur ini menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (*Media Center*) dan pengembangan Pusat Jaringan Informasi Pedesaan (PJIP), akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

- c. Penerapan Balangan *Online* Informasi dan Teknologi, memberikan dampak terhadap perubahan pola perencanaan, penganggaran, pelayanan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan secara bertahap, sehingga memberikan dampak terhadap kemudahan, kecepatan, ketepatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Isu isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :

- a. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
- b. Kelembagaan pengadaan barang / jasa secara elektronik
- c. Dinamika masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan prima

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2021, merupakan tahun pertama RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 yang disusun dan ditetapkan setelah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2021 berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan sebagai salah satu SOPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 – 2026 yaitu

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA, MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan ;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif;

Prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 yang terkait dengan tugas dan fungsi Diskominfosan adalah misi ke 1, Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Sasaran yang ingin dicapai untuk prioritas ini adalah meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan strategi peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas data dan informasi dan memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Infrastruktur Jaringan internet ke Pedesaan, mengintegrasikan data skpd di kabupaten Balangan, Meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi public untuk masyarakat kabupaten Balangan.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(8)	(4)	(10)	(11)	(12)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	B	9.196.432.400	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	B	11.098.920.240	
a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	57.200.700	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 dokumen	96.210.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat	3 dokumen	47.751.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat	3 dokumen	44.330.000	

			Daerah yang disusun					Daerah yang disusun			
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah dokumen perencanaan SOPD	12 dok	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen perencanaan SOPD	12 bulan	10.800.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja SOPD	2 Dok	9.448.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan SOPD	Balangan	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	2 Dok	40.000.000	
B	Kegiatan Administrasi Keuangan	Balangan	Jumlah waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 bulan	4.326.321.709	Kegiatan Administrasi Keuangan	Balangan	Jumlah waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 bulan	3.748.833.600	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	13 orang bulan	4.326.321.709	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	13 orang bulan	3.698.833.600	

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	10 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	10 dokumen	50.000.000	
C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah waktu penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	302.230.500	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah waktu penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	132.500.000	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Balangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	39 orang	234.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Balangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 orang	27.500.000	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Balangan	Jumlah pakaian karyawan/ti yang diadakan	140 Stel	68.230.500	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Balangan	Jumlah pakaian karyawan/ti yang diadakan	140 stel	105.000.000	
d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	1.255.053.200	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	746.988.085	

1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	13.279.900	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	15.287.085	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 buah	12.690.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 buah	235.810.000	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	20.930.800	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	21.807.500	
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	9.609.600	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	-	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Balangan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	1.163.230.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Balangan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	474.083.500	

e	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	330.000.000	
1	Pengadaan Mebel	Balangan	Jumlah mebel yang diadakan	0	0	Pengadaan Mebel	Balangan	Jumlah mebel yang diadakan	50 buah	50.000.000	
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Gedung Kantor yang diadakan	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Gedung Kantor yang diadakan	1 buah	200.000.000	
3	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Balangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang diadakan	0	0	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Balangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang diadakan	2 buah	80.000.000	
f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	339.571.500	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	322.901.535	

1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Balangan	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadakan	12 bulan	53.894.500	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Balangan	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadakan	12 bulan	14.520.000
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Balangan	-jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar	12 bulan	66.898.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Balangan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar	12 bulan	102.960.000
3	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Kabupaten Balangan	-Jumlah frekuensi perbaikan peralatan kerja -Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban tugas -Jumlah TKHL yang menjalankan tugas kebersihan kantor -Jumlah ATK yang disediakan -Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	12 bulan	218.779.000	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Kabupaten Balangan	-Jumlah frekuensi perbaikan peralatan kerja -Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban tugas -Jumlah TKHL yang menjalankan tugas kebersihan kantor -Jumlah ATK yang disediakan -Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	12 bulan	205.421.535

g	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	493.945.400	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	172.026.900	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Kabupaten Balangan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	222.765.400	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Kabupaten Balangan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	72.026.900	
2	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	271.180.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	100.000.000	
B	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten Balangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik	80%	6.630.971.900	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten Balangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik	82%	8.266.766.938	

a	Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik	80%	6.630.971.900	Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik	82%	4.133.383.469	
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Balangan	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindak lanjuti	100%	89.085.100	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Balangan	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindak lanjuti	100%	84.580.210	
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Balangan	Persentase informasi yang telah disampaikan ke masyarakat	80%	131.620.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Balangan	Persentase informasi yang telah disampaikan ke masyarakat	85%	101.294.010	
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Balangan	Jumlah artikel info publik	1200 artikel	903.480.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Balangan	Jumlah artikel info publik	1800 artikel	161.337.700	
4	Pelayanan informasi publik	Kabupaten Balangan	Persentase SKPD yang membentuk	100%	116.040.000	Pelayanan informasi publik	Kabupaten Balangan	Persentase SKPD yang membentuk	100%	65.009.500	
5	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Balangan	Persentase Publikasi di Media Masa	80%	5.143.969.000	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Balangan	Persentase Publikasi di Media Masa	85%	3.692.285.399	
6	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah PPID pembantu yang dikelola	30	101.157.800	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah PPID pembantu yang dikelola	30	-	

7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Balangan	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibentuk	30 KIM	145.620.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Balangan	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibentuk	30 KIM	28.876.650	
C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kabupaten Balangan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	40%	4.021.794.152	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kabupaten Balangan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	40%	19.555.492.000	
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%		
a	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub	Kabupaten Balangan	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang terintegrasi dengan aplikasi Dashboard Pemerintah Kabupaten	75%	794.879.600	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub	Kabupaten Balangan	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang terintegrasi dengan aplikasi Dashboard Pemerintah Kabupaten	75%	858.000.000	
1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah sub domain yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten/Kota	5 sub domain	-	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah sub domain yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten/Kota	5 sub domain	220.000.000	

2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	Kabupaten Balangan	Persentase domain dan sub domain yang terlayani	100%	-	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	Kabupaten Balangan	Persentase domain dan sub domain yang terlayani	100%	33.000.000	
3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	794.879.600	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	605.000.000	
b	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	85%	3.226.914.552	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	85%	8.892.246.000	
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan	Balangan	Jumlah Layanan Dasar SPBE	2 kali	-	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan	Balangan	Jumlah Layanan Dasar SPBE	2 kali	33.000.000	
2	Sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis	Balangan	Tersedianya peraturan pedoman tata Kelola SPBE	2 Perbup	382.637.600	Sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis	Balangan	Tersedianya peraturan pedoman tata Kelola SPBE	3 Perbup	33.000.000	
3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Balangan	Jumlah server yang dikelola Pemerintah Kabupaten Balangan	8 unit	-	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Balangan	Jumlah server yang dikelola Pemerintah Kabupaten Balangan	8 unit	605.000.000	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Balangan	Jumlah desa pada wilayah Blank Spot	14 desa	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Balangan	Jumlah desa pada wilayah Blank Spot	14 desa	50.000.000	

5	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Balangan	Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan	1 aplikasi	-	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Balangan	Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan	1 aplikasi	579.040.000	
6	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Balangan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	68%	2.844.276.952	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Balangan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	45%	5.647.206.000	
7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Balangan	Jumlah pembangunan jaringan LAN WAN, Satelit Pembangunan Ruang Server dan Comand Center	1 paket	-	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Balangan	Jumlah pembangunan jaringan LAN WAN, Satelit Pembangunan Ruang Server dan Comand Center	1 paket	2.000.000.000	
E	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten Balangan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam	65%	214.436.000	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten Balangan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam	65%	1.959.760.000	
			menyusun perencanaan pembangunan daerah					dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
a	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/kota	Balangan	Persentase elemen data dan informasi statistik yang terpublikasikan dan terupdate	65%	214.436.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/kota	Balangan	Persentase elemen data dan informasi statistik yang terpublikasikan dan terupdate	65%	979.880.000	

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data	Kabupaten Balangan	Persentase elemen data dan informasi statistic yang terpublikasikan dan terupdate	100%	161.970.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data	Kabupaten Balangan	Persentase elemen data dan informasi statistic yang terpublikasikan dan terupdate	100%	178.535.500	
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik	Kabupaten Balangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	3 orang	-	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik	Kabupaten Balangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	4 orang	22.000.000	
3	Membangun Metadata Statistik	Kabupaten Balangan	Jumlah Metadata yang dihasilkan	3 Sektor	-	Membangun Metadata Statistik	Kabupaten Balangan	Jumlah Metadata yang dihasilkan	3 Sektor	97.344.500	
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Balangan	Terlaksananya Pembinaan Statistik Sektoral SKPD	30 SKPD	-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Balangan	Terlaksananya Pembinaan Statistik Sektoral SKPD	30 SKPD	440.000.000	
5	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Balangan	Persentase OPD yang memiliki system aplikasi	1 aplikasi	-	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Balangan	Persentase OPD yang memiliki system aplikasi	1 aplikasi	121.000.000	

6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kabupaten Balangan	Optimalisasi Data Statistik Sektoral dari masing-masing instansi/SKPD	4 SKPD	52.466.000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kabupaten Balangan	Optimalisasi Data Statistik Sektoral dari masing-masing instansi/SKPD	6 SKPD	121.000.000	
F	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI	Kabupaten Balangan	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	100%	28.634.800	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI	Kabupaten Balangan	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	100%	241.063.680	
a	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase terselenggaranya pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang terpulihkan	100%	28.634.800	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase terselenggaranya pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang terpulihkan	100%	120.531.840	
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik	Kabupaten Balangan	Persentase pengamanan informasi yang berhasil dilaksanakan	100%	28.634.800	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik	Kabupaten Balangan	Persentase pengamanan informasi yang berhasil dilaksanakan	100%	120.531.840	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan TUPOKSI Dinas. Usulan-usulan dari aspirasi masyarakat melalui DPRD akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil rapat pembahasan APBD 2021 dengan DPRD , Dinas Komunikasi dan Informatika telah menerima usulan-usulan dari masyarakat sesuai tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 10 usulan yang diakomodir.

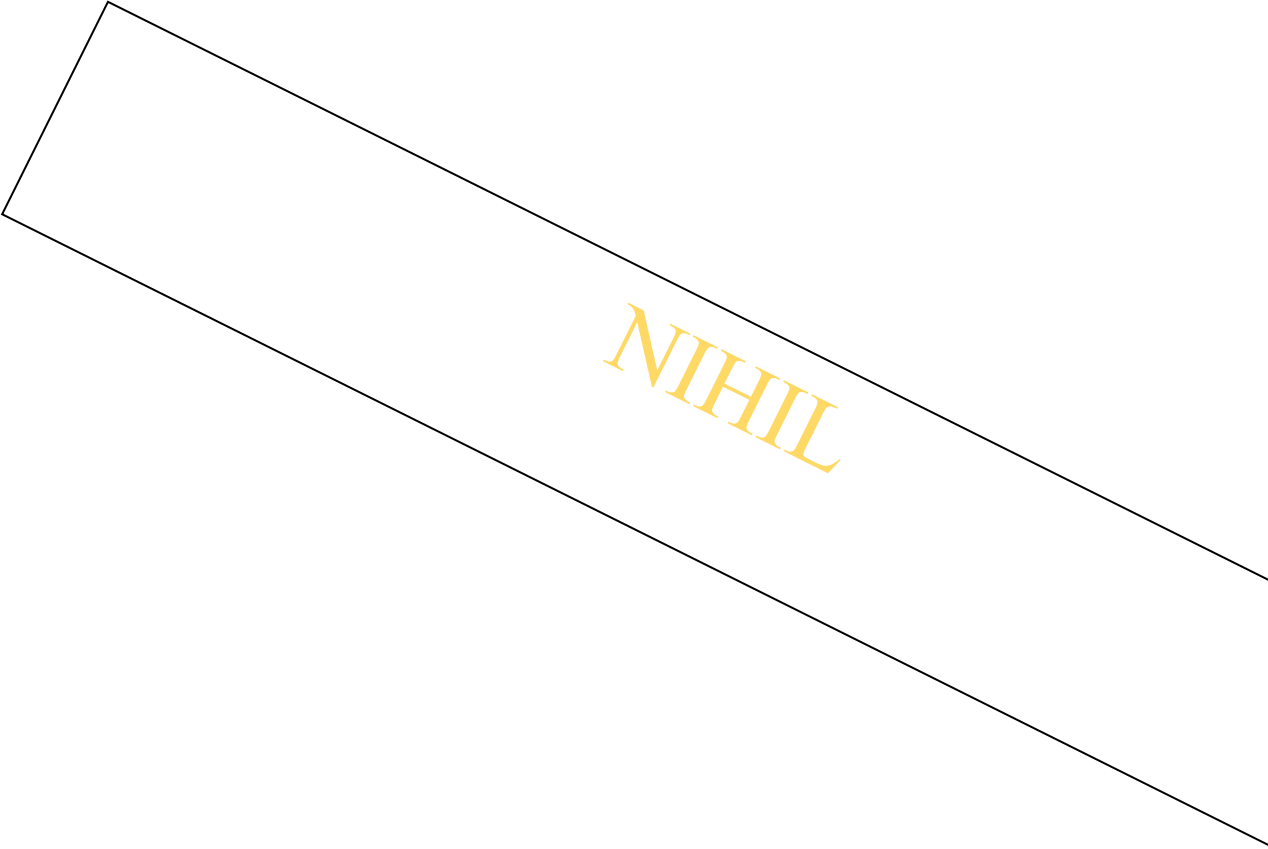
Hal ini dapat dilihat pada tabel. 2.5

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

 <p>NIHIL</p>					
--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2020-2024, RKP Nasional, Rensta Kementerian Kominfo 2020-2024; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kalimantan Selatan 2020–2025, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2023; dan RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Balangan 2023.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN SINERGITAS KEBIJAKAN DAERAH.

A. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Kebijakan Umum Nasional

Kebijakan nasional pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika diarahkan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah

perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- a. terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- b. tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- c. terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- d. terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

2. Arah Kebijakan Umum Nasional

Sedangkan arah kebijakan Pembangunan Nasional bidang Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika di Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut

- a. Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika (telekomunikasi, media, dan informatika);
- b. Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas pelayanan prima.
- c. Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu, menjadi tenaga ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dibidang komunikasi dan informatika.

3. Sasaran Kebijakan Umum Nasional

a. Bidang Infrastruktur Informasi dan Komunikasi

- 1) Tersedianya akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia (mengecilnya kesenjangan digital) .
- 2) Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot .
- 3) Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern
- 4) Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi, .
- 5) Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara online.

b. Bidang Komunikasi dan Informasi

1. Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan masyarakat dalam kerangka NKRI ,
2. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik,
3. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Bidang Komunikasi dan Informatika

Adapun arah kebijakan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan komunikasi dan informatika adalah :

- Peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah

- peningkatan kualitas sarana pelayanan publik, peningkatan kualitas data dan informasi,
- mendorong pengembangan kualitas Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah, dan
- peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Dengan program prioritas sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan dan pengelolaan informasi publik dan statistik
- 2) Program Pengembangan dan pengelolaan komunikasi public
- 3) Program Pengembangan dan pengelolaan E-Government
- 4) Program Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK dan Persandian

Selengkapnya dapat dilihat di Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
1	Mewujudkan konektivitas pita lebar nasional, mewujudkan pemerintah sebagai Government Public Relation (GPR),	Renstra Kementerian Koinfo 2020-2024	
2	Mendukung revolusi mental	RPJMN 2020-2024	
3	Pengembangan infrastruktur pitalebar termasuk layanan 4G	Renstra Kementrian	

		Kominfo 2020-2024	
4	Efisiensi industri telekomunikasi	Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024	
5	Mendorong peningkatan jumlah kandungan dalam negeri pada alat dan perangkat telekomunikasi	Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024	
6	Mengintegrasikan nomor panggilan, penataan registrasi Prabayar	Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024	
7	Mengurangi peredaran perangkat telepon selular ilegal	Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024	
8	Meningkatkan keamanan informasi dan optimalisasi tata kelola internet	Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024	
9	Mendorong pertumbuhan e-Commerce	Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024	
10	Menerapkan DNS dalam rangka mengurangi konten ilegal	Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024	
11	Mengintegrasikan layanan e-Government	Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024	
	Mempercepat proses migrasi	Renstra	

	TV analog ke digital	Kementrian Koinfo 2020-2024	
B	Provinsi Kalimantan Selatan		
1	Peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah	RPJMD Prov Kalsel Tahun 2021-2026	
2	Peningkatan kualitas sarana pelayanan public	RPJMD Prov Kalsel Tahun 2021-2026	
3	Peningkatan kualitas data dan informasi	RPJMD Prov Kalsel Tahun 2021-2026	
4	Mendorong pengembangan kualitas Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah	RPJMD Prov Kalsel Tahun 2021-2026	

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatkan kinerja Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfosan	20%

Sedangkan Tujuan dan sasaran penyusunan Renja Diskominfo Tahun 2023 ini antara lain:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sehingga bisa mendukung semua program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sistem komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Meningkatkan kesediaan data dan informasi yang akurat, reliabel, dan lengkap;
- d. Mewujudkan layanan akses komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien;
- e. Penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas;
- f. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik.
- g. Mewujudkan daya guna informasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan focus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika serta terjalin kerjasama informasi dengan media massa;
 - b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk
-

- kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang;
- c. Meningkatkan kesediaan data dan informasi yang akurat, reliabel, dan lengkap;
 - d. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur Komunikasi dan Informatika;
 - e. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan sistem layanan pemerintahan melalui teknologi informasi (e-government) yang terintegrasi di Kabupaten Balangan;
 - f. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi.
 - g. Tersedianya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akurat, cepat dan tepat.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Untuk Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan merencanakan :

- APBD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian : 5 Program, 11 Kegiatan, 28 sub kegiatan yaitu :

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan
 - Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.3.2 Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan meliputi :

- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - Pengelolaan konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik

- Layanan Hubungan Media'
- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

3.3.3 Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan meliputi :

- Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

3.3.4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan kegiatan meliputi

- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

3.3.5 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan meliputi :

- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 Kabupaten Balangan untuk sumber dana APBD Kabupaten secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.2

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
 Prakiraan Maju Tahun 2024
 Provinsi/Kabupaten/Kota Kabupaten
 Balangan
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
 Persandian

lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Targe t Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	16	1							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Balanga n	B	5.204.296.059	APBD		B	6.404.980.131
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Balanga n	80%		APBD		82%	

2	16	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Balangan	10 Dok	57.200.700	APBD	10 Dok	119.864.114
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Balangan	3 Dok	47.751.900	APBD	3 Dok	66.332.200
2	16	1	2.01	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SOPD	Balangan	12 Dok	-	APBD	12 Dok	13.531.914
2	16	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan SOPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun	Balangan	-	9.448.800	APBD	2 Dok	40,000,000
2	16	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balangan	12 Bulan	4.326.321.709	APBD	12 Bulan	4.264.443.926
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	Balangan	13 orang bulan	4.326.321.000	APBD	13 orang bulan	4.214.443.926
2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Balangan	-	-	APBD	10 Dok	50,000,000

2	16	1	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah waktu penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Balangan	12 Bulan	302.230.500	APBD		12 Bulan	401.450.000
2	16	1	2.05	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Balangan	49 orang	234.000.000	APBD		54 orang	296.450.000
2	16	1	2.05	1 1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian karyawati yang diadakan	Balangan	140	68.230.500	APBD		140 stel	105,000,000
2	16	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balangan	12 Bulan	1.255.053.200	APBD		12 Bulan	831.017.894
2	16	1	2.06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Balangan	12 Bulan	13.279.900	APBD		12 Bulan	16.815.794
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Balangan	20 buah	48.002.900	APBD		20 buah	235,810,000
2	16	1	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Balangan	12 bulan	20.930.800	APBD		12 bulan	23.988.250

2	16	1	2.06	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Balangan	12 bulan	9.609.600	APBD	12 bulan	-
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Balangan	12 Bulan	1.163.230.000	APBD	12 Bulan	554.403.850
2	16	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balangan	12 Bulan	-	APBD	12 bulan	80.000.000
2	16	1	2.07	2	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Balangan	0 buah	-	APBD	0	0
2	16	1	2.07	5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diadakan	Balangan	-	-	APBD	0	0
2	16	1	2.07	9	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang diadakan	Balangan	-	-	APBD	2 buah	80,000,000
2	16	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Balangan	12 bulan	339.571.500	APBD	12 bulan	419.069.343

					Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah							
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadakan	Balangan	12 bulan	53.894.500	APBD		12 bulan	31.944.000
					Penyediaan Jasa	Jumlah bulan penyediaan jasa							
2	16	1	2.08	2	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	Balangan	12 bulan	66.898.000	APBD		12 bulan	113.256.000
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah frekuensi perbaikan peralatan kerja	Balangan	12 bulan	218.779.000	APBD		12 bulan	273.869.343
						Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban tugas	Balangan						
						Jumlah TKHL yang menjalankan tugas kebersihan kantor	Balangan						
						Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Balangan						
						Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Balangan						
2	16	1	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Balangan	12 bulan	493.945.400	APBD		12 bulan	369.134.855

					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah							
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,	Jumlah bulan pemeliharaan							
2	16	1	2.09	2	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Balangan	12 bulan	222.765.400	APBD		12 bulan	269.134.855
2	16	1	2.09	1 0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Balangan	12 bulan	271.180.000	APBD		12 Bulan	100,000,000
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Pemerintah	Balangan	85%	6.630.971.900	APBD		90%	3,903.446.786
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Persentase Informasi Publik yang disediakan	Balangan	82%	6.630.971.900	APBD		84%	3.903.446.786

					Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dan diumumkan oleh Dinas Kominfosan tentang Keterbukaan Informasi							
					Monitoring	Presentase pengaduan							
2	16	2	2.01	2	Opini dan Aspirasi Publik	masyarakat yang selesai ditindak lanjuti	Balangan	100%	89.085.100	APBD		100%	93.038.231
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Berita yang siap Tayang	Balangan	48 Konten	131.620.000	APBD		48 Konten	110.724.401
2	16	2	2.01	5	Pedngelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah artikel info publik	Balangan	600 artikel	903.480.000	APBD		600 artikel	168.327.800
2	16	2	2.01	6	Pelayanan informasi publik	Persentase SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID pembantu	Balangan	100%	116.040.000	APBD		100%	71.999.600
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah media publikasi informasi daerah di media massa, cetak dan online	Balangan	40 media	5.143.969.000	APBD		40 media	3.304.761.000
2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah PPID Pembantu yang terkelola	Balangan	30	101.157.800	APBD		30	111.273.580

2	16	2	2.01	1 2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kelompok informasi masyarakat (IKM) yang diberdayakan di Kabupaten Balangan	Balangan	30 KIM	145.620.000	APBD	30 KIM	154.595.650
2	16	3			PROGRAM POENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Memiliki Akses Internet dan Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Balangan	40%	4.021.794.152	APBD	60%	10.455.550.000
						Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		18%			18%	
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang terintegrasi dengan aplikasi Dashboard Pemerintah Kabupaten Balangan	Balangan	70%	794.879.600	APBD	75%	580.175.000

					a								
2	16	3	2.01	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Domain yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten/Kota	Balangan	5 sub domain	-	APBD		5 sub domain	242.000.000
2	16	3	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain dan sub domain terlayani	Balangan	100%	-	APBD		100%	36.300.000
2	16	3	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Balangan	100%	794.879.600	APBD		100%	301.875.000
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Balangan	80%	3.226.914.552	APBD		85%	5.461.160.344
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan	Balangan	2	-	APBD		2	36.300.000

					government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Implementasi Penerapan SPBE Pemerintah Daerah							
2	16	3	2.02	2	Sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya peraturan pedoman tata kelola SPBE	Balangan	1	382.637.600	APBD		1	36.300.000
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah server yang dikelola Pemerintah Kabupaten Balangan	Balangan	8 unit	-	APBD		8 unit	605.000.000
2	16	3	2.02	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase SKPD yang dibentuk dan menjalankan PPID Pembantu	Balangan	100%	-	APBD		100%	71.999.600
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan	Balangan	1 aplikasi	-	APBD		1 aplikasi	165.375.000
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur TIKuntuk	Balangan	68%	2.844.276.952	APBD		100%	4.413.085.744

						pemerataan akses konektivitas antar SKPD							
						Persentase Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Koneksi Internet di Desa Blank Spot		96%				100%	
						Persentase Layanan internet yang disediakan Dinas Kominfo		100%				100%	
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Pembangunan jaringan LAN WAN, Satelit Pembangunan Ruang Server dan Comand Center Control	Balangan	1 paket	-	APBD		1 paket	133.100.000
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	Balangan	65%	214.436.000	APBD		80%	1.077.868.000

2	20	2	1.01		Penyelenggara n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase elemen data dan informasi statistic yang terpublikasikan dan terupdate	Balangan	100%	214.436.000	APBD	100%	1.077.868.000
2	20	2	1.01	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolah, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase data yang dikumpulkan	Balangan	100%	161.970.000	APBD	100%	196.389.050
						Persentase data yang diolah		100%			100%	
						Persentase data yang dianalisis		100%			100%	
						Jumlah Buku Statistik yang dicetak		3 buku			3 buku	
2	20	2	1.01	0 2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Balangan	4 orang	-	APBD	5 Orang	24.200.000
2	20	2	1.01	0 3	Membangun Metadada Statistik Sektoral	Jumlah Metadada yang dihasilkan	Balangan	3 Sektor	-	APBD	3 Sektor	107.078.950
2	20	2	1.01	0 4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya Pembinaan Statistik Sektoral SKPD	Balangan	30 SKPD	-	APBD	30 SKPD	484.000.000

2	20	2	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Persentase OPD yang memiliki sistem aplikasi	Balangan	1 aplikasi	-	APBD	1 aplikasi	133.100.000
2	20	2	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Optimalisasi Data Statistik Sektoral dari masing-masing instansi/SKPD	Balangan	6 SKPD	52.466.000	APBD	8 SKPD	133.100.000
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengelolaan Keamanan Informasi Perangkat Daerah	Balangan	100%	28.634.800	APBD	100%	132.585.024
2	21	2	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terpulihkan	Balangan	100%	28.634.800	APBD	100%	132.585.024
2	21	2	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Terselenggaranya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang tertangani	Balangan	100%	28.634.800	APBD	100%	132.585.024
TOTAL									17.427.089.061			22.085.703.417

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan pada tahun 2023 mempunyai 5 Program, 11 Kegiatan, 28 sub kegiatan.

Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 1 program sedangkan *4 program sebagai pendukung yaitu :*

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi dan komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Sedangkan program yang mendukung capaian sasaran ada 1 yaitu:

1. Program Aplikasi Informatika

Usulan pendanaan program kegiatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 17.427.089.061,-

Tabel 4.1
Usulan Pendanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	SESUAI PAGU	Belanja Utama	
(2)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
Bidang Urusan Sekretariat							KELEBIHAN/ KURANG
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Diskominfo	B	6.774.323.009	6.774.323.009		0,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keterbukaan Informasi Publik		80%				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Diskominfo	10 dok	57.200.700	57.200.700		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Diskominfo	3 dok	47.751.900	47.751.900	Belanja TKHL administrasi penyusunan dokumen perencanaan	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja	Diskominfo	12 dok	9.448.800	9.448.800	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Perencanaan	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	13 bulan	4.326.321.709	4.326.321.709	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	Diskominfo	13 orang bulan	4.326.321.709	4.326.321.709	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah waktu penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Diskominfo	54 orang	302.230.500	302.230.500	Belanja pakaian dinas dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Diskominfo	170 stel	68.230.500	68.230.500	Belanja Pakaian Dinas	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	54 orang	234.000.000	234.000.000	Belanja bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	12 bulan	1.255.053.200	1.255.053.200	Belanja komponen listrik, belanja barang cetakan dan penggandaan, belanja bahan bacaan peraturan perundang-undangan, belanja perjalanan dinas	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Diskominfo	12 bulan	13.279.900	13.279.900	Belanja komponen listrik	

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Diskominfo	20 Buah	48.002.900	48.002.900	Belanja printer, bendera dan umbul-umbul	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Diskominfo	12 bulan	20.930.800	20.930.800	Belanja Cetak	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	Diskominfo	12 bulan	9.609.600	9.609.600	Belanja Bahan Bacaan/Buku, Belanja Surat Kabar/Majalah	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Diskominfo	12 bulan	1.163.230.000	1.163.230.000	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	12 bulan	339.571.500	339.571.500	Belanja TKHL administrasi umum, belanja langganan listrik, air dan telepon, belanja alat kebersihan, belanja TKHL kebersihan	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadakan	Diskominfo	12 bulan	53.894.500	53.894.500	Belanja TKHL administrasi umum	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	Diskominfo	12 bulan	66.898.000	66.898.000	Belanja langganan listrik air dan telepon	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah frekuensi perbaikan peralatan kerja, Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban tugas, Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan, Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Diskominfo	12 bulan	218.779.000	218.779.000	Belanja TKHL tenaga kebersihan, Belanja service peralatan kantor, Belanja ATK, Belanja Makanan dan Minuman	

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	12 bulan	493.945.400	493.945.400	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Diskominfo	12 bulan	222.765.400	222.765.400	Belanja service kendaraan bermotor	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor Lainnya	Diskominfo	12 Bulan	271.180.000	271.180.000	Belanja pemeliharaan atap Gedung kantor, Belanja TKH Jaga Malam	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah	Balangan	85%	6.630.971.900	6.630.971.900	Belanja Kerjasama Media	0,00
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Diskominfo tentang Keterbukaan Informasi	Balangan	85%	6.630.971.900	6.630.971.900	Belanja Kerjasama Media	0,00
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Presentase aduan masyarakat yang selesai ditindak lanjuti	Balangan	100%	89.085.100	89.085.100	Belanja Makan Minum Kegiatan dan Belanja Perjalanan Dinas	0,00
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten berita yang siap tayang	Balangan	48 konten	131.620.000	131.620.000	Belanja TKHL tenaga peliputan/media center	0,00

Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah artikel info publik	Balangan	600 artikel	903.480.000	903.480.000	Honorarium Penulis berita, belanja TKHL administrasi umum	0,00
Pelayanan informasi publik	Persentase SKPD yang dibentuk dan menjalankan PPID	Balangan	100%	116.040.000	116.040.000	Belanja pembuatan video informasi	0,00
Layanan Hubungan Media	Jumlah media publikasi informasi daerah di media massa, cetak dan online	Balangan	40 media	5.143.969.000	5.143.969.000	Belanja Langganan Surat Kabar/Kerjasama Media	0,00
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah PPID pembantu yang terkelola	Balangan	30 PPID Pembantu	101.157.800	101.157.800	Belanja makan minum sosialisasi, spanduk, ATK, pengandaan	0,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kelompok informasi masyarakat (IKM) yang diberdayakan di Kab. Balangan	Balangan	8 KIM	145.620.000	145.620.000	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Makanan dan Minuman	0,00
PROGRAM POENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Balangan	40%	4.021.794.152	4.021.794.152	Belanja Bandwith, Belanja Pemeliharaan Menara dan Belanja Pembangunan Jaringan Koneksi Internet Desa	0,00
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		18%				
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang terintegrasi dengan aplikasi Dashboard Pemerintah Kabupaten	Balangan	70%	794.879.600	794.879.600	Belanja Tenaga Ahli IT, Belanja sewa aplikasi	0,00

Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balangan						
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Balangan	100%	794.879.600	794.879.600	Belanja Tenaga Ahli IT, Belanja sewa aplikasi	
Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Balangan	85%	3.226.914.552	3.226.914.552	Belanja Manajemen Bandwith, Belanja Pembangunan Jaringan Koneksi Internet Desa	
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Peraturan atau kebijakan SPBE yang disusun	Balangan	2	382.637.600	382.637.600	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas SKPD	Balangan	68%	2.844.276.952	2.844.276.952	Belanja Pembangunan Jaringan Koneksi Internet antar SKPD	
	Persentase pembangunan dan pengembangan jaringan koneksi internet di desa Balnk Spot		96%			Belanja Pembangunan Jaringan Koneksi Internet Desa	
	Persentase layanan internet yang disediakan Dinas Kominfo		100%			Belanja Manajemen Bandwith	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Balangan	65%	214.436.000	214.436.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase elemen data dan informasi statistik yang terpublikasikan dan terupdate	Balangan	65%	214.436.000	214.436.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase data yang dikumpulkan	Balangan	100%	161.970.000	161.970.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	
	Persentase data yang diolah		100% 1				
	Persentase data yang dianalisis		100%				
	Jumlah Buku Statistik yang dicetak		3 Buku				
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Optimalisasi data Statistis sektoral dari masing-masing Instansi/SKPD	Balangan	8	52.466.000	52.466.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	Balangan	100%	28.634.800	28.634.800	Belanja pemeliharaan jaringan internet, belanja bimbingan teknis	

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang terpulihkan	Balangan	100%	28.634.800	28.634.800	Belanja pemeliharaan jaringan internet, belanja bimbingan teknis	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Terselenggaranya pengamanan Informasi Pemerintah daerah yang tertangani	Balangan	100%	28.634.800	28.634.800	Belanja pemeliharaan jaringan internet, belanja bimbingan teknis	
			TOTAL RKA	17.427.089.061	17.427.089.061		0,00

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur

Renja Kerja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja 2023 ini diharapkan agar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, terukur dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan , adil dan akuntabel.

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Balangan


MUHAMMAD NOR, S.Sos., MM

NIP. 19710823 199303 1 005